

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di wilayahnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program beasiswa sebagai instrumen strategis dalam pembangunan pendidikan. Program ini tidak hanya ditujukan untuk membantu pembiayaan pendidikan, tetapi juga berperan dalam mendorong pemerataan akses, meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, serta memperkuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, beasiswa menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan melalui jalur pendidikan, mencegah pernikahan dini akibat rendahnya partisipasi sekolah, serta membentuk SDM yang kompetitif dan berdaya saing. Dengan meningkatnya kualitas SDM, daerah diharapkan mampu menarik investasi dari luar dan memperkuat posisi strategisnya dalam pembangunan nasional (Azrul, M et al., 2024).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa program beasiswa dari pemerintah daerah seringkali belum dimaknai secara menyeluruh oleh penerimanya. Studi oleh (Okvianti et al., 2024) tentang Beasiswa Karawang Cerdas, menunjukkan bahwa mahasiswa penerima memaknai beasiswa hanya sebagai bantuan ekonomi tanpa memahami tanggung jawab sosial dan akademik yang menyertainya. Hal ini menunjukkan adanya pemaknaan yang parsial terhadap tujuan program. Penelitian serupa oleh (Utami, 2021) di Kabupaten Lamandau, yang menemukan adanya kesenjangan komunikasi antara pemerintah daerah dan mahasiswa penerima. Hal tersebut terlihat dalam proses sosialisasi program dan pendampingan yang belum optimal, sehingga informasi penting mengenai visi misi, serta peran mahasiswa sebagai agen perubahan tidak sepenuhnya tersampaikan. Hal ini menjadi

pemanfaatan beasiswa belum berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan SDM lokal sebagaimana diharapkan pemerintah daerah.

Temuan serupa diperoleh dalam penelitian (Saputra & Tri, 2022) yang dilakukan di Kabupaten Nunukan menunjukkan bahwa proses seleksi penerimaan beasiswa lebih memprioritaskan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dibandingkan dengan kriteria pendukung lainnya seperti penghasilan orang tua, jumlah tanggungan, semester dan status beasiswa. Kebijakan ini cenderung merugikan mahasiswa pendaftar dari latar belakang ekonomi menengah kebawah memiliki IPK rendah, mereka menjadi kurang berpeluang untuk lolos seleksi meskipun memiliki kebutuhan ekonomi yang mendesak. Akibatnya, terjadi ketimpangan dalam penerimaan manfaat beasiswa serta membentuk pengalaman yang berbeda dalam pemaknaan beasiswa.

Penelitian tentang Program Beasiswa lain seperti beasiswa Ti Bupati (BESTI) di Kabupaten Bandung dan Beasiswa Karawang Cerdas menunjukkan pola yang sama. Meskipun terbukti mampu membantu meringankan beban finansial mahasiswa, manfaatnya belum optimal karena sebagian penerima hanya memaknainya sebagai bantuan keuangan semata. Kesadaran mahasiswa penerima cenderung terbatas pada fungsi praktis, yaitu sekadar sebagai solusi untuk kebutuhan ekonomi seperti membayar UKT atau kebutuhan hidup harian. Padahal, beasiswa dari pemerintah daerah juga mengandung fungsi strategis, seperti mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam pembangunan kapasitas diri, aktif dalam pembangunan daerah dan membentuk kepedulian sosial (Widiyaningrum et al., 2024).

Sementara itu, terdapat pula penelitian yang menunjukkan bahwa pemaknaan yang lebih mendalam mampu membentuk kesadaran yang positif. Penelitian yang dilakukan (Wahyudi, 2018) tentang beasiswa di Banyuwangi menegaskan bahwa beasiswa tidak hanya sebagai alat mobilitas vertikal, tetapi juga berperan dalam pembentukan perilaku sosial mahasiswa penerima program, termasuk kesadaran akan pentingnya kontribusi di masyarakat. Temuan ini dikuatkan dalam penelitian Albar Meky Pondalus dan Indra

Lestari Fawzi (Pondalus & Fawzi, 2021) dalam evaluasi program CSR beasiswa PT Krakatau Steel yang menunjukkan bahwa keberhasilan program beasiswa ditentukan oleh keselarasan antara tujuan lembaga pemberi beasiswa dan kesadaran sosial mahasiswa penerima beasiswa dalam persoalan pendidikan dan kemiskinan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan, salah satunya adalah program beasiswa pendidikan yang menyasar mahasiswa dari keluarga kurang mampu namun berprestasi. Dasar hukum pelaksanaan program Beasiswa Perintis adalah Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemberian Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa melalui Program Beasiswa Perintis, serta diperkuat oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 07 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 07). Kebijakan ini tidak hanya menjadi instrumen pemerataan akses pendidikan tinggi, tetapi juga menjadi landasan penting dalam membentuk kesadaran mahasiswa sebagai bagian dari pembangunan daerah, yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

Upaya mengatasi ketimpangan akses beasiswa perlu berpijak pada nilai kemanusiaan serta keberpihakan terhadap kelompok yang memiliki keterbatasan ekonomi. Melalui pembukaan akses yang lebih luas bagi mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa, diharapkan proses pemaksimalan kualitas sumber daya manusia dapat berjalan lebih baik dan berdampak positif pada pembangunan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan melalui program Beasiswa Perintis yang

ditujukan bagi mahasiswa asal Lamongan yang melanjutkan pendidikan ke berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. (Dalla & Kewuel, 2023).

Namun, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga dari bagaimana mahasiswa memaknai dan menyadari posisi mereka sebagai penerima program. Motivasi belajar adalah elemen kunci dalam proses pendidikan yang berkontribusi pada kesuksesan akademik mahasiswa. Faktor-faktor seperti dukungan finansial, dorongan sosial, dan ambisi pribadi dapat berperan dalam membentuk motivasi belajar individu (Mica Siar Meiriza et al., 2023). Dengan memahami posisi tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya melihat beasiswa sebagai bantuan finansial semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan dorongan untuk berkembang menjadi sumber daya manusia yang unggul serta berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Pendekatan fenomenologi Alfred Schutz relevan untuk mengkaji kesadaran mahasiswa sebagai konstruksi sosial yang terbentuk melalui pengalaman subjektif. Schutz membedakan dua jenis motif dalam tindakan manusia, yaitu (*because of motive*) dan (*in order to motive*). (*Because of motive*) merupakan alasan retrospektif mengapa seseorang melakukan tindakan tertentu berdasarkan pengalaman masa lalu. Sedangkan (*in order to motive*) merujuk pada tujuan yang ingin dicapai seseorang dimasa depan melalui tindakanya. (Haryanto, 2012)

Tujuan Schutz adalah untuk mengingatkan bahwa (*verstehen*) merupakan cara pemahaman yang rasional dalam kehidupan sehari-hari yang dapat melahirkan kebenaran bersifat umum yang terkontrol serta dapat dibuktikan. Schutz juga mengasumsikan bahwa dunia kehidupan (*lifeworld*) dianggap tidak problematis. (Wirawan, 2012). Schutz mengkhususkan perhatiannya pada bentuk bentuk dari intersubjektivitas, yaitu bagaimana kesadaran sosial terbentuk dalam kelompok melalui proses saling memahami dan berinteraksi dalam dunia kehidupan sehari-hari (*life world*). (Ritzer & Goodman, 2004) Schutz juga memusatkan perhatian pada struktur kesadaran yang memungkinkan terjadinya saling memahami dan interaksi sosial. Ia

menekankan bahwa pemahaman individu tidak terjadi secara acak, melainkan melalui struktur kesadaran yang mendasari interaksi sosial (Ritzer, 2021).

Namun demikian, keberhasilan program beasiswa tidak hanya ditentukan oleh aspek administratif seperti jumlah dana yang disalurkan atau jumlah penerima beasiswa, melainkan juga oleh tingkat kesadaran mahasiswa dalam memaknai program tersebut secara menyeluruh. Makna yang dibangun oleh mahasiswa penerima beasiswa sering kali menekankan pada aspek bantuan biaya pendidikan yang dipengaruhi oleh pengalaman subjektif masing-masing individu. Keberhasilan program ini idealnya dievaluasi melalui keterlibatan berbagai pihak dengan menggunakan indikator efektivitas, kecukupan, responsibilitas dan ketepatan. penerapan, Program ini dapat dikatakan efektif karena telah mencapai tujuan yang ditetapkan, sebagaimana terlihat dalam evaluasi program Beasiswa Genius S1.(Rahmawati & Adi, 2023)

Latar belakang ekonomi, sosial, budaya, serta pengalaman hidup yang beragam menciptakan medan sosial yang unik dalam memaknai beasiswa yang mereka terima. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana konstruksi kesadaran sebagai penerima beasiswa terbentuk melalui pengalaman pribadi masing-masing individu. Penelitian yang dilakukan oleh (Aro Laia et al., 2021). menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang mekanisme serta persyaratan beasiswa daerah, baik bagi yang menempuh pendidikan di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Nias Selatan, mendorong mereka untuk berprestasi secara akademik maupun nonakademik guna membiayai studi mereka. Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahan tanpa hambatan pembiayaan, meskipun berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas.

Program Beasiswa Perintis ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan di Kabupaten Lamongan (Azrul, M et al., 2024). Universitas Trunodjoyo Madura menjadi salah satu kampus yang banyak menerima mahasiswa asal

Lamongan, termasuk penerima Beasiswa Perintis. Latar belakang sosial, ekonomi, dan pengalaman hidup yang beragam menyebabkan pemaknaan terhadap beasiswa ini bersifat subjektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji konstruksi kesadaran mahasiswa penerima Beasiswa Perintis di UTM melalui pendekatan fenomenologi Alfred Schutz, dengan fokus pada pengalaman subjektif mahasiswa dalam kehidupan akademiknya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengangkat judul Studi Tentang Kesadaran Mahasiswa Universitas Trunodjoyo Madura Sebagai Penerima Beasiswa Perintis Pemerintah Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Fenomenologi Alfred Schutz.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana kesadaran mahasiswa Universitas Trunodjoyo Madura sebagai penerima Beasiswa Perintis dari Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam memaknai program tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kesadaran kritis mahasiswa penerima beasiswa perintis dari Pemerintah Kabupaten Lamongan yang menempuh studi di Universitas Trunodjoyo Madura melalui pendekatan fenomenologi Alfred Schutz.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu sosiologi, khususnya dalam studi tentang kesadaran mahasiswa penerima beasiswa perintis Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui perspektif fenomenologi Alfred Schutz.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. **Bagi penulis** yaitu menambah wawasan dan pemahaman mengenai bagaimana mahasiswa memaknai beasiswa perintis berdasarkan pengalaman subjektif masing-masing individu.
2. **Bagi mahasiswa penerima beasiswa** diharapkan dapat menjadi refleksi dan memberikan pemahaman tentang pentingnya memaknai beasiswa berdasarkan pengalaman subjektif dan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang setiap individu.